KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SESI 1

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS KKP 2025 panganbiru 08 POVERTY GROWTH

SOSIALISASI

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

PERMEN PANRB NOMOR 17 TAHUN 2024

Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap



Disampaikan oleh:
Auditor Madya Inspektorat IV

Jakarta, 16 Juli 2025

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM MEMPERKUAT INTEGRITAS BIROKRASI

Konflik Kepentingan merupakan Lahan Subur bagi Korupsi

Konflik kepentingan tidak selalu berarti korupsi, tetapi menciptakan kondisi ideal bagi praktik korupsi untuk tumbuh dan mengakar.

(OECD – Managing Conflict of Interest in the Public Service, 2003)

Konflik Kepentingan Menggerus Netralitas dan Kepercayaan Publik

Ketika tidak dikelola, konflik kepentingan melemahkan netralitas pejabat publik, menurunkan kredibilitas institusi, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

(UNODC – Preventing and Managing Conflicts of Interest, 2019)

60% Kasus Korupsi Berawal dari Konflik Kepentingan

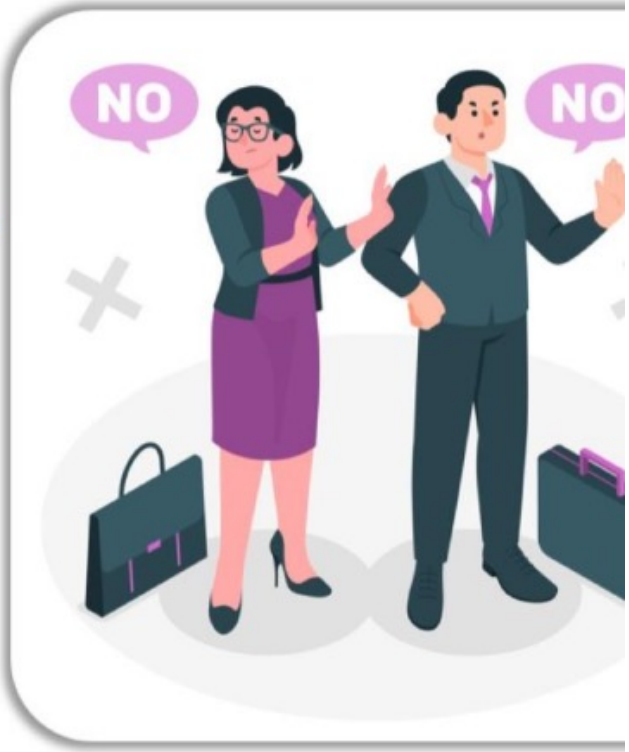
Studi global menemukan bahwa sebagian besar kasus korupsi sektor publik di negara berkembang bermula dari konflik kepentingan yang tidak ditangani.

(Transparency International – Political Integrity Report, 2020)

Regulasi Tanpa Budaya Etik Tidaklah Cukup

Meskipun aturan sudah tersedia, lemahnya pengawasan, ketakutan retaliasi, dan budaya organisasi yang permisif membuat pejabat enggan melaporkan konflik kepentingan.

(European Commission – Integrity Review, 2021)



© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENGAPA KONFLIK KEPENTINGAN HARUS DIKELOLA SERIUS?

panrb



"1 dari 2 ASN menyalahgunakan fasilitas negara"
(Survei Penilaian Integritas KPK, 2023)



"60% kasus korupsi berakar dari CoI"
(Transparency International, 2020)



"Hanya 8 negara OECD yang melakukan verifikasi CoI"
(OECD, 2022)



"70% K/L belum menjalankan pelaporan CoI"
(Evaluasi Permenpanrb Nomor 37 Tahun 2020)



© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA AKSI
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK) 2025 – 2026
Terkait Pengelolaan Konflik Kepentingan

STRANAS PK

1. Pemetan risiko Konflik Kepentingan di setiap Unit Kerja (Eselon II)
2. Peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan
3. Pengembangan sistem deklarasi dan konektivitas dengan LHKPN/Gratifikasi/ *Beneficial Ownership*
4. Tim *Focal Point* konsultasi Konflik Kepentingan
5. Evaluasi pelaksanaan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan

   pada:
   Mei 2025 dan November 2025,
   Mei 2026 dan November 2026.

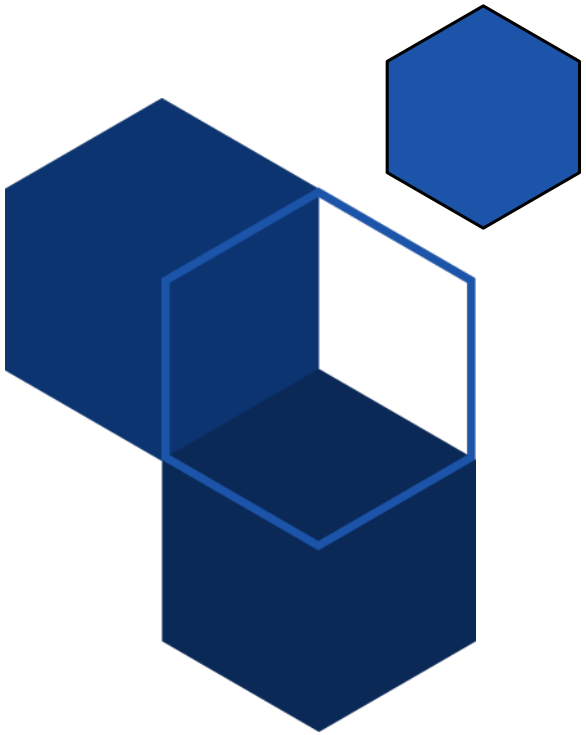


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PROGRES PENYEMPURNAAN

PERMEN KP NOMOR 13/PERMEN-KP/2016* di Tahun 2025

*tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP





Analisis dan EvaluasI (Anev) Permen KP No. 13/PERMEN-KP/2016



Pembahasan draf Revisi Permen KP No. 13/PERMEN-KP/2016



Penyampaian izin prakarsa kepada Menteri KP

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA PENGAWASAN ITJEN

Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2025



Sosialisasi Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Bulan Juni Tahun 2025



Pemantauan Pengelolaan Konflik Kepentingan pada **Minggu I** Bulan **September 2025**:

Kegiatan : Pemantauan Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup Unit Eselon I

Output : LHP Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup Unit Eselon I



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DASAR HUKUM

1 **Permen PAN dan RB No. 17 Tahun 2024**
tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
Mencabut **Permen PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012** tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
***diundangkan pada 31 Oktober 2024**

Pasal 39
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah yang telah menetapkan ketentuan terkait pengelolaan Konflik Kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini **paling lambat 6 (enam) bulan** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. → **31 April 2025**

2 **Permen KP No.13/PERMEN-KP/2016**
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP

Belum sesuai dengan Permen PAN dan RB tersebut.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KONFLIK KEPENTINGAN

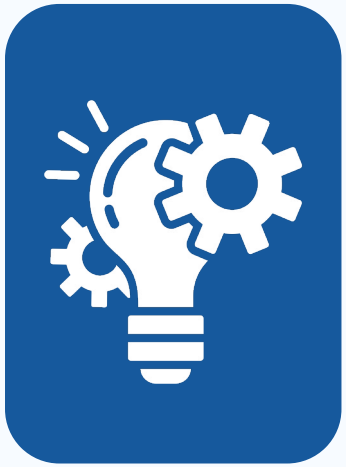
Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Upaya yang dilakukan untuk **mengelola** proses pengambilan Keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat Pemerintahan

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KONSEP DASAR KONFLIK KEPENTINGAN



- Pejabat publik **dilarang** mengambil keputusan/tindakan jika berada pada situasi konflik kepentingan

Berada dalam situasi konflik kepentingan tidak serta merta salah/melanggar hukum, sebab konflik kepentingan **terkadang tidak dapat dihindari**. Setiap orang punya berbagai macam kepentingan yang dapat menjadi sumber konflik kepentingan.

Menjadi bermasalah jika konflik kepentingan yang dimiliki **memengaruhi pengambilan keputusan/tindakan** pejabat publik.

Karenanya perlu dilakukan **pengelolaan** konflik kepentingan oleh pejabat publik serta instansi pemerintah agar Keputusan/tindakan yang diambil terhindar dari pengaruh kepentingan pribadi.

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TUJUAN DIKELOLANYA KONFLIK KEPENTINGAN

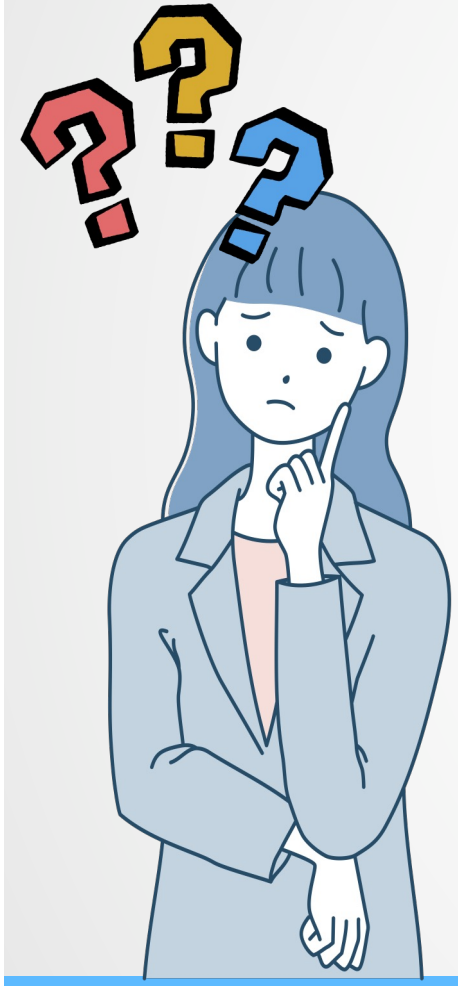


- Tata kelola pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan publik
- Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dalam mengelola konflik kepentingan
- Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan
- Memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas
- Memastikan adanya dokumen kelembagaan pada instansi pemerintah dalam rangka pengelolaan konflik kepentingan
- Mengakomodasi partisipasi masyarakat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Siapa yang dimaksud dengan

“PEJABAT PEMERINTAHAN TERTENTU” ?





ASN





Anggota Polri dan Prajurit TNI
yang menduduki jabatan ASN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS KKP 2025 panganbiru 08 POVERTY GROWTH

JENIS KONFLIK KEPENTINGAN

KONFLIK KEPENTINGAN POTENSIAL

Kondisi adanya kepentingan pribadi pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain **berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan**, yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

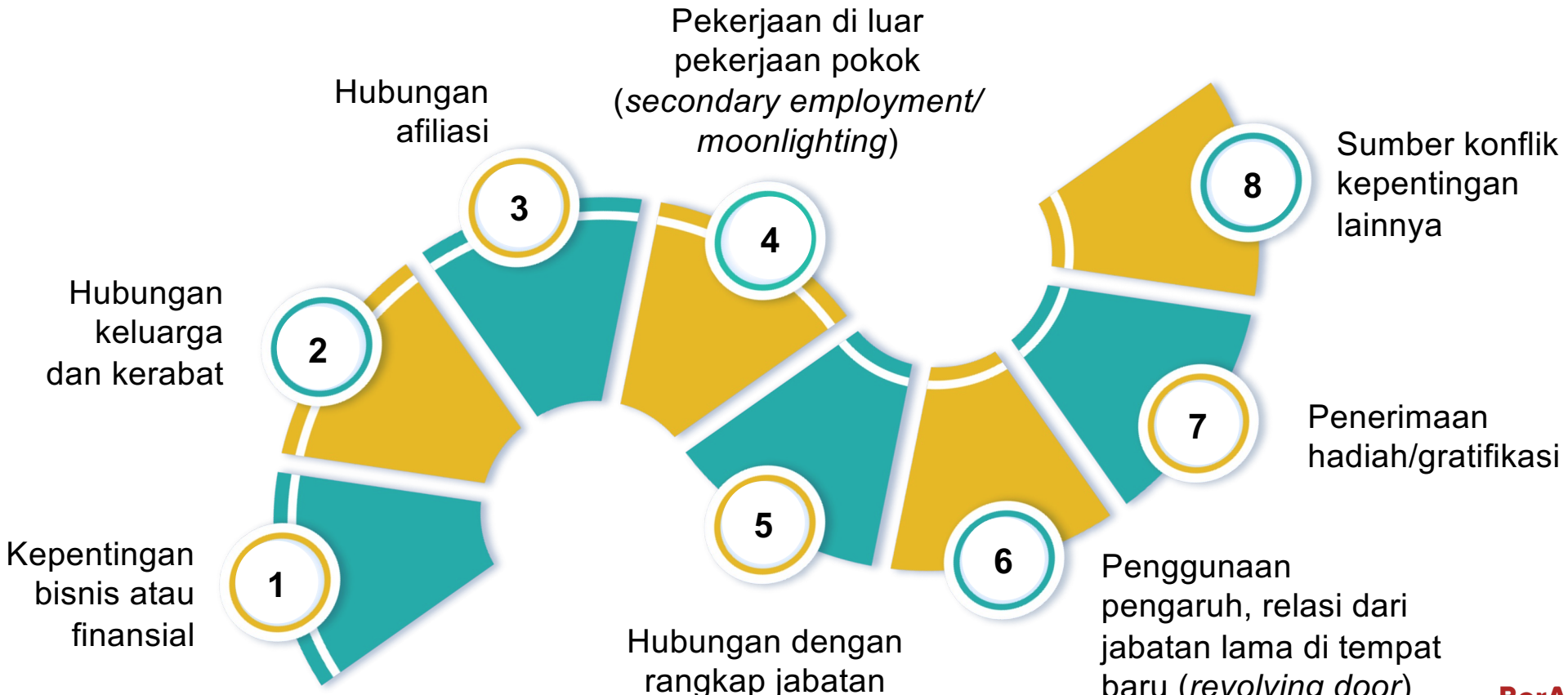
* Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual, setiap Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial secara berkala.

KONFLIK KEPENTINGAN AKTUAL

Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

* Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan Aktual Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat.

SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

CONTOH KONFLIK KEPENTINGAN

berdasarkan Sumber Konflik Kepentingan



Hubungan Keluarga/Kerabat

Pejabat Pemerintah menjadi penentu penilaian proses pengadaan, di mana anaknya bekerja pada salah satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan tersebut.



Kepentingan Bisnis/Finansial

Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut melakukan pengawasan dan/atau menentukan hasil pengawasan atas pengerjaan sebuah proyek, di mana dirinya juga memiliki saham atas perusahaan yang sedang diawasi.



Hubungan Afiliasi

Pejabat Pemerintahan Tertentu akan mengambil keputusan terkait promosi terhadap seorang pegawai, padahal ia mengetahui bahwa pegawai tersebut merupakan keluarga dekat dari dokter yang pernah menyembuhkan anaknya.



Pekerjaan di Luar Pekerjaan Pokok

Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan pengaruh dari jabatan dan/atau kewenangannya untuk mempromosikan atau memasarkan barang/jasa yang merupakan bagian dari pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH KONFLIK KEPENTINGAN

berdasarkan Sumber Konflik Kepentingan



Rangkap Jabatan

Pejabat Pemerintahan Tertentu di instansi Pusat memobilisasi program-program Pusat untuk diprioritaskan pelaksanaannya di suatu daerah, di mana dirinya sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur di daerah tersebut.



Pengaruh Jabatan Lama di Tempat Baru

Mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan informasi internal instansinya untuk kepentingan organisasi/ perusahaan, di mana mantan Pejabat Pemerintah tersebut saat ini bekerja.



Hadiah/Gratifikasi di luar Korupsi

Pihak ketiga memberikan gratifikasi kepada keluarga/kerabat Pejabat Pemerintah Tertentu yang sedang berulang tahun.
Pihak ketiga tersebut kemudian mengajukan perizinan kepadanya.



Sumber Konflik Kepentingan Lainnya

Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan aset jabatan/instansi yang dibawa/dikuasai di luar penggunaan tugas dan kewenangannya.
Misalnya menggunakan mobil dinas di luar untuk mudik.

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SESI 2

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS KKP 2025 panganbiru 08 POVERTY GROWTH

SOSIALISASI

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

PERMEN PANRB NOMOR 17 TAHUN 2024

Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap



Disampaikan oleh:
Auditor Madya Inspektorat IV

Jakarta, 16 Juli 2025

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki **instrumen kebijakan** untuk mendukung pelaksanaannya,



sekurang-kurangnya meliputi:



Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan



Pembentukan komitmen:

a. Menyediakan sumber daya yang diperlukan
b. Memiliki SDM dengan kompetensi dan kualifikasi cukup berkaitan pengelolaan pengaduan dan pengawasan thd Konflik Kepentingan.
c. Sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur Konflik Kepentingan



Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan (**P3KK**)

* Dalam hal dibutuhkan, setiap Instansi Pemerintah dapat menetapkan petunjuk teknis

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki **instrumen kebijakan** untuk mendukung pelaksanaannya, *sekurang-kurangnya*





Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan



Pembentukan komitmen:

a. Menyediakan sumber daya yang diperlukan
b. Memiliki SDM dengan kompetensi dan kualifikasi cukup berkaitan pengelolaan pengaduan dan pengawasan thd Konflik Kepentingan.
c. Sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur Konflik Kepentingan



Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan (**P3KK**)

* Dalam hal dibutuhkan, setiap Instansi Pemerintah dapat menetapkan petunjuk teknis

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

CONTOH MATRIKS IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO KONFLIK KEPENTINGAN

No.	SUBJEK		SUMBER	BENTUK	PENILAIAN RISIKO			STRATEGI PENANGANAN	WAKTU PELAKSANAAN												MONITORING PELAKSANAAN	KETERANGAN
					P/K	D	PETA RISIKO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Perencanaan	Kuasa Pengguna Anggaran	Hubungan Keluarga dan Kerabat	Keponakan	3	3	Sedang	Membuat Formulir Daftar Kepentingan Pribadi	v												Sesuai	Formulir Daftar Kepentingan
							-	Membuat Deklarasi Konflik Kepentiangan Aktual ketika Terdapat Kondisi Adanya Kepentingan Pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan/atau Orang Lain secara Nyata dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan	v												Sesuai	Dokumen Deklarasi Konflik Kepentingan
							-	Sosialisasi dan Internalisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan									v				Tidak Sesuai	Terdapat Blokir Anggaran, sehingga pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan pada 9 September 2025, sesuai bukti dukung Notulen/Laporan Kegiatan "....."
							-	Peningkatan Kompetensi										v			Tidak Sesuai	
2	Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen	Hubungan Afiliasi	Teman Satu Alumni	3	5	Sangat Tinggi	Membuat Deklarasi Konflik Kepentiangan Aktual ketika Terdapat Kondisi Adanya Kepentingan Pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan/atau Orang Lain secara Nyata dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan													Sesuai	Tidak Terdapat Formulir Daftar Kepentingan Pribadi dikarenakan Tidak Terdapat Penyedia yang menyebabkan Bentuk Konflik Kepentingan
3	Pengangkatan, Promosi, Mutasi dan Kebijakan Manajemen SDM	Analis Kepegawaian	Hubungan Keluarga dan Kerabat	Menantu	3	4	Tinggi	Membuat Deklarasi Konflik Kepentiangan Aktual ketika Terdapat Kondisi Adanya Kepentingan Pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan/atau Orang Lain secara Nyata dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan								v					Sesuai	Tidak terdapat Konflik Kepentingan untuk Promosi Pangkat/Jabatan, Namun terdapat Mutasi dari Anggota keluarga pada Bulan Agustus, sehingga terdapat Deklarasi "....."
dst							-															

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

JABATAN RENTAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pada dasarnya semua jabatan di mana pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki **instrumen kebijakan** untuk mendukung pelaksanaannya, *sekurang-kurangnya*



Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan



Pembentukan komitmen:

a. Menyediakan sumber daya yang diperlukan
b. Memiliki SDM dengan kompetensi dan kualifikasi cukup berkaitan pengelolaan pengaduan dan pengawasan thd Konflik Kepentingan.
c. Sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur Konflik Kepentingan



Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan (**P3KK**)

* Dalam hal dibutuhkan, setiap Instansi Pemerintah dapat menetapkan petunjuk teknis

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SOSIALISASI, PELATIHAN DAN KONSULTASI

Kementerian/lembaga harus melakukan **sosialisasi** serta memfasilitasi penyelenggaraan **pelatihan** dan **konsultasi** pengelolaan konflik kepentingan.

Pelatihan khusus pengelolaan konflik kepentingan dilaksanakan **oleh BKN** bagi :

a. calon pegawai ASN (pada pelatihan dasar);
b. Pejabat pada pelatihan kepemimpinan.

Konsultasi difasilitasi oleh **Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan** di setiap instansi.

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki **instrumen kebijakan** untuk mendukung pelaksanaannya, *sekurang-kurangnya*





Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan



Pembentukan komitmen:

a. Menyediakan sumber daya yang diperlukan
b. Memiliki SDM dengan kompetensi dan kualifikasi cukup berkaitan pengelolaan pengaduan dan pengawasan thd Konflik Kepentingan.
c. Sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur Konflik Kepentingan



Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan (**P3KK**)

* Dalam hal dibutuhkan, setiap Instansi Pemerintah dapat menetapkan petunjuk teknis

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TUGAS P3KK

PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN

1. Mendukung implementasi pengelolaan Konflik Kepentingan, termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan MR, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan, dan pengaduan.
2. Memfasilitasi pelatihan, asistensi, dan konsultasi kepada Pejabat Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konflik Kepentingan.
3. Menyusun laporan hasil Monev internal pengelolaan Konflik Kepentingan.

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN



Pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi

Pelatihan dan konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan

Deklarasi Konflik Kepentingan Aktual

Pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu *(cooling period)* mantan pejabat pemerintahan

Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan Aktual

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH DRAF SOP PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN POTENSIAL

UNTUK KKP 2025 panganbiru 08

Pejabat Pemerintahan Tertentu — 1

Pencatatan daftar Kepentingan Pribadi

Output:
Informasi daftar kepentingan pribadi

Pejabat Pengelolaan COI — 2

Menerima daftar kepentingan pribadi, menganalisis dan mengadministrasikan

Output:
Daftar kepentingan pribadi, Hasil analisis, Informasi daftar kepentingan pribadi

7 hari

Pejabat Pengelolaan COI — 3

Menyampaikan informasi daftar kepentingan pribadi kepada atasan langsung

Output:
Memorandum lampiran informasi daftar kepentingan pribadi

1 hari

Atasan Langsung — 4

Menerima Daftar kepentingan pribadi sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan

Output:
Surat Penetapan penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan

2 hari

Atasan Langsung — 5

Menyampaikan informasi penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu dam Pejaabat Pengelola COI

Output:
Dokumen penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu.

1 hari

BerAKHLAK

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH DRAF SOP PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN AKTUAL

UNTUK KKP 2025 panganbiru 08

Pejabat Pemerintahan Tertentu — 1

Membuat deklarasi konflik kepentingan melalui formulir/ aplikasi dan menyampaikan kepada atasan langsung

Output:
Formulir deklarasi konflik kepentingan

Atasan Langsung — 2

Menerima formulir deklarasi konflik kepentingan dan melakukan analisis, dengan cara memeriksa, meneliti dan menetapkan bentuk pengendalian konflik kepentingan

Output:
Formulir analisis deklarasi konflik kepentingan dan dan penentapan bentuk pengendalian

Paling lama 7 hari

Atasan Langsung — 3

Menyampaikan hasil penetapan pengendalian konflik kepentingan kepada Pejabat Pemerintah tertentu

Output:
Surat / memorandum

Atasan Langsung — 4

Menyampaikan dokumen deklarasi dan hasil analisis konflik kepentingan kepada Pejabat Pengelola konflik kepentingan untuk di arsipkan

Output:
Surat / memorandum

1 hari

BerAKHLAK

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENCATATAN/PELAPORAN
DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

Wajib, secara berkala 1 x dalam 1 tahun, minimal memuat:

1. Identitas diri.
2. Jabatan dan unit kerja.
3. Daftar keluarga/kerabat yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
4. Daftar kepemilikan saham > 1%, aset/investasi lain > Rp500jt, pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis bentuk lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
5. Pekerjaan di luar pekerjaan pokok
6. Jabatan publik lain yang sedang diembannya (rangkap jabatan)
7. Afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis
8. Rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi timbulkan konflik kepentingan, disampaikan sekurang-kurangnya 60 hari sebelum masa pensiun/berhenti.

Tujuan pencatatan/pelaporan: jika ada potensi konflik kepentingan yang besar/terus-menerus, dapat dilakukan upaya pencegahan– misal penempatan pejabat di posisi lain.

FORMULIR
DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

Format Permen PANRB No. 17 Tahun 2024

Formulir Daftar Kepentingan Pribadi

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

A.	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Nama	Hubungan	Pekerjaan / Jabatan dan Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

* Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu merupakan informasi publik dan wajib dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan Per-UU.
* Sistem teknologi informasi akan disediakan oleh Kementerian PANRB.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMULIR DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu saat berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual

Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada,

Nama Atasan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta keputusan dan/atau tindakan yang dihadapi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

YANG HARUS DILAKUKAN

Pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi

Kewajiban tiap ASN/TNI/Polri mencatatkan/ melaporkan daftar kepentingan pribadi setiap tahun

Deklarasi Konflik Kepentingan

(pada atasan)

Kewajiban mendeklarasikan/ menyampaikan pada atasan jika akan mengambil keputusan/ tindakan dimana ia memiliki konflik kepentingan

Tindak Lanjut Deklarasi

(oleh atasan)

Kewajiban atasan untuk menganalisis kondisi konflik kepentingan yang dideklarasikan bawahan dan menetapkan bentuk pengendaliannya

Pembatasan bagi Mantan Pejabat

(*revolving door*)

Pembatasan (untuk waktu tertentu) bagi pejabat aktif untuk mengambil peputusan/ tindakan tertentu yang terkait kepentingan mantan pejabat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TINDAK LANJUT DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Deklarasi Konflik Kepentingan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu

Atasan Pejabat Menganalisis Deklarasi dimaksud

Memeriksa dan meneliti konflik kepentingan yang dideklarasikan serta dampak dan kemungkinan hal tersebut dapat mempengaruhi netralitas pengembalian keputusan/tindakan

Bukan merupakan konflik kepentingan atau ada konflik kepentingan, namun dianggap tidak berdampak besar akan memengaruhi kualitas dan netralitas pengambilan keputusan/tindakan,

1. Membolehkan Pejabat Pemerintahan Tertentu mengambil keputusan/Tindakan, **atau**
2. Membolehkan Pejabat Pemerintahan Tertentu mengambil keputusan /Tindakan dengan membatasi sebagian akses/kewenangan mereka.

Terdapat konflik kepentingan yang dapat berdampak pada netralitas pengambilan keputusan/tindakan,

1. Atasan pejabat **mengambil alih** pembuatan keputusan/Tindakan **dan**
2. Menyarankan pengambilan konflik kepentingan lain

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGAWASAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

TUJUAN PENGAWASAN: Menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan

DILAKUKAN OLEH atau DIPEROLEH DARI

ATASAN LANGSUNG
Pejabat Pemerintahan Tertentu

PENGADUAN

1. Tiap instansi harus menyediakan **mekanisme pengaduan** dugaan konflik kepentingan (dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengaduan yang telah ada).
2. Mekanisme pengaduan harus menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor.
3. Pengaduan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MONEV PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

- Ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang pengelolaan Konflik Kepentingan Instansi Pemerintah dengan Peraturan Menteri
- Ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan
- Ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko
- Capaian dan tantangan pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan
- Kepatuhan Pejabat Pemerintahan dalam mencatatkan kepentingan pribadi serta mendeklarasikan Konflik Kepentingan serta atasan Pejabat Pemerintahan melakukan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
- Pelaksanaan pelatihan dan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan; dan
- Tindak lanjut pengaduan terkait Konflik Kepentingan.

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

APRESIASI
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Apresiasi dapat diberikan kepada pejabat dan instansi yang memberikan contoh baik serta berperan proaktif dalam mengelola konflik kepentingan.

Apresiasi dapat diberikan dalam bentuk:

a. penilaian capaian reformasi birokrasi (pada K/L/D); dan

b. capaian kinerja (bagi individu pejabat).

© 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS KKP 2025 panganbiru 08 POVERTY GROWTH

TERIMA KASIH

Salam Integritas!

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif